

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI SMP NEGERI 3 MENGWI**

I Rai Wahyudi Putra
Ida Ayu Putu Sri Widnyani*

Abstrack

In accordance with the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016, the quality assurance system for primary and secondary education aims to ensure the fulfillment of standards in the education unit systematically, holistically, and sustainably, so that the culture grows in the education unit independently. The problems of this study are: 1. How is the implementation of the Minister of Education and Culture Regulation No. 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi, 2. What factors are hampering the implementation of Minister of Education and Culture Regulation number 28 of 2016 concerning the quality assurance system for primary and secondary education in SMP Negeri 3 Mengwi. This research is a qualitative research. In this study the authors found several research results, namely: 1. At SMP Negeri 3 Mengwi, the education quality mapping process has been carried out, namely by using an internal quality mapping system conducted by the School through the dapodik system, which contains all School data and annually completes the quality mapping questionnaire by utilizing the quality mapping application and the results of the quality mapping process. this is a school having a School quality mapping report card. From the report card, it can be seen how the school quality conditions are in accordance with 8 Education Quality Standards. Every 5 years the quality mapping process is also carried out by the National Accreditation Board of the Provincial Government. 2. The obstacles in implementing Permendikbud No. 28 2016 are the obstacles that occur from environmental conditions both within the School's internal environment and from the School's external environment.

Keywords: Policy Implementation, Education Quality Standards, Primary and Secondary Education

*Program Studi Magister Ilmu Administrasi,
Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar.
Email : raiwahyudiputra@gmail.com

1. Pendahuluan

Pemerintah mengembangkan system informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data informasi dalam system informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

Mutu Pendidikan dapat diketahui dengan mengadakan penilaian atau mengacu pada standar nasional pendidikan dengan menggunakan instrument yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar nasional pendidikan dijabarkan ke dalam 8 standar mutu pendidikan yakni : 1. Standar Isi Pendidikan, 2. Standar Penilaian Pendidikan, 3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 4. Standar Kompetensi Lulusan, 5. Standar Proses Pembelajaran, 6. Standar Sarana dan Prasarana, 7. Standar Pengelolaan, dan 8. Standar Pembiayaan.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Mengwi, terletak di Desa Buduk Mengwi tepatnya di Banjar Sengguan Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Telp (0361) 8484148 , email : smpnegeri3mengwi@gmail.com. SMP Negeri 3 Mengwi merupakan salah satu Sekolah faporit di Kabupaten Badung khususnya di Kecamatan Mengwi, selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Saat ini jumlah peserta didik 1101 siswa, yang didukung 88 Guru dan 23 orang Pegawai. Jumlah rombongan belajar sebanyak 34 rombel dengan ruang kelas sebanyak 22 ruang, dengan demikian di SMP Negeri 3 Mengwi dilakukan 2 kelompok pembelajaran yaitu kelompok pagi dan siang. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang tertuang dalam Permendikbud No. 28 tahun 2016, Sekolah selalu mengembangkan model – model pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Peningkatan prestasi sekolah tidak hanya mengedepankan pada bidang akademik, tetapi juga perlu dilegkapi dengan prestasi non akademik, seperti keberadaan gedung maupun alat sarana

prasarana sesuai kebutuhan siswa. Dengan demikian tentunya banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah.

Tabel 1.1 Indikator Standar Nasional Pendidikan

No	Tingkat	Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
1	*	Menuju SNP 1	0	2.04
2	**	Menuju SNP 2	2.05	3.7
3	***	Menuju SNP 3	3.71	5.06
4	****	Menuju SNP 4	5.07	6.66
5	*****	SNP	6.67	7

Sumber : <https://vervaldata.kemdikbud.go.id>

Pada table indikator Standar Nasional Pendidikan diatas menunjukkan standar capaian batas bawah dan akhir dari Standar nasional pendidikan yang dikategorikan ke dalam 5 kategori yaitu Menuju SNP 1, menuju SNP 2, menuju SNP 3, Menuju SNP 4, dan SNP (standar nasional pendidikan).

Tabel 1.2 Tabel Capaian SNP SMP Negeri 3 Mengwi tahun 2018

No	Standar Nasional Pendidikan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Kab. Badung 2016	Prov. Bali 2017	Nasional 2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.69	6.44	6.81	6.6	6.5	6.27
2	Standar Isi	4.5	6.44	6.08	5.87	5.96	5.83
3	Standar Proses	5.46	6.82	6.54	6.64	6.61	6.47
4	Standar Penilaian Pendidikan	3.54	6.37	5.92	6.31	6.27	6
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.02	3.74	3.87	3.67	3.72	3.4
6	Standar Sarana dan Prasarana	5.51	4.62	4.76	4.07	3.93	3.95
7	Standar Pengelolaan	4.84	6.38	6.09	6.16	6.05	5.79
8	Standar Pembiayaan	4.16	5.21	5.94	5.55	5.83	5.76

Sumber : <https://vervaldata.kemdikbud.go.id>

Dari table di atas menunjukkan bahwa, capaian SMP Negeri 3 Mengwi pada tahun 2018 masih belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Dari 8 Standar Nasional Pendidikan hanya standar kompetensi

lulusan yang sudah dikategorikan SNP, standar isi masih pada kategori menuju SNP 4, standar proses masih pada kategori menuju SNP 4, standar penilaian pendidikan masih pada kategori menuju SNP 4, standar pendidik dan tenaga kependidikan pada kategori menuju SNP 3, standar sarana dan prasarana masih pada kategori menuju SNP 3, standar pengelolaan pendidikan masih pada kategori menuju SNP 4, dan standar pembiayaan juga masih dikategorikan menuju SNP 4. Dari uraian ini maka tentunya masih banyak yang bisa dikembangkan atau dicarikan solusi mengenai hambatan pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 tahun 2016 demi terwujudnya Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan latar belakang diatas memunculkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di SMP Negeri 3 Mengwi?
2. Factor – factor apa yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di SMP Negeri 3 Mengwi?

2. Konsep Dan Landasan Teori

2.1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Ealau dan Prewit dalam Suharto (2010:7) kebijakan adalah “sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya”. Titmuss dalam Suharto (2010:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problemoriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

2.2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) Implementasi adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

2.3. Standar Nasional Pendidikan

Dengan demikian, implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. Delapan standar nasional tersebut terdiri dari:

1. Standar Isi, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademik.
2. Standar Proses, standar kedua berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan dan pencapaian standar proses diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif dengan berdasarkan pada standar kompetensi lulusan.
3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar Sarana dan Pra Sarana, standar ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya.
6. Standar Pengelolaan, merupakan standar yang berkaitan pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien, pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi hingga pengelolaan tingkat nasional.
7. Standar Pembiayaan, merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun satu tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
8. Standar penilaian, standar ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan (sekolah), dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

2.4. Konsep Sistem

Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3): Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan,

yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Pengertian sistem menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011:3), Sistem merupakan “serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok.

2.5. Konsep Pendidikan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.6. Konsep Penjamin Mutu Pendidikan

Nanang Fattah (2012: 2) berpendapat bahwa mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu. Dalam kaitan ini peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan. Lebih lanjut Nanang Fattah (2012:2) menjelaskan, penjaminan mutu (*Quality Assurance/QA*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders. Penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dan kedua, dalam bentuk budaya mutu (*quality culture*) yang mengandung tata nilai (*values*) yang menjadi keyakinan stake holders pendidikan dan prinsip atau asas-asas yang dianutnya. Dengan demikian penjaminan mutu sebagai suatu sistem mengandung tata nilai

dan asas dalam proses perubahan, perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2.7. Konsep Pendidikan Dasar dan Menengah

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan pasal 17 UU RI No. 20 tahun 2003 menerangkan bahwa:

- a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penjelasan atas pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa “Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket B yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal. Dalam UU No. 2 tahun 1989, Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan dasar adalah pendidikan sembilan tahun dengan pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan sederajat. Secara terminologis pendidikan dasar dapat diartikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan terendah atau Sekolah Dasar (SD) dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan dasar secara epistemologis, merupakan pem-besikan peserta didik dengan sejumlah dasar-dasar ilmu pengetahuan dan menjadi pengetahuan dasar pada jenjang pendidikan berikutnya.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah

Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Dalam UU NO 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah Menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Landasan Teori

3.1. Kebijakan Publik

Menurut Irfan Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat

3.2. Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edward III dalam Dwiyanto (2017: 31-33) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program /kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program, maka akan mengurangi penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah sesungguhnya.
- b) Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program /kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c) Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program

secara konsisten. Sikap demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sarsan terhadap implementor dan program/kebijakan.

- d) Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standard operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan . SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas , sistematis tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan Struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain

4. Metode Penelitian

4.1. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugino (2008 : 9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

4.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di SMP Negeri 3 Mengwi yang berlokasi di Banjar Sengguan Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena mutu pendidikan SMP Negeri 3 Mengwi masih belum sepenuhnya memenuhi 8 standar mutu pendidikan yang ditunjukkan di dalam standar indicator SNP (Standar Nasional Pendidikan), untuk itu penulis ingin meneliti dan mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi Sekolah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan No. 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah..

4.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis – jenis data dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Menurut sifatnya, jenis – jenis data yaitu :

1. Data kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang penulis peroleh melalui observasi dan wawancara dengan informan mengenai implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 3 Mengwi.

2. Data Kwantitatif

Data kuantitatif adalah data yang penulis peroleh mengenai implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 3 Mengwi berupa data jumlah Guru, Jumlah Pegawai, Jumlah Siswa, dan lain lain yang disajikan dalam bentuk angka.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Menurut Umar (2007 : 41) data primer merupakan data dari sumber pertama, seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sejalan dengan

pernyataan diatas, Sugiyono (2008 : 222) mengemukakan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Jadi data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung dari sumbernya yaitu lokasi penelitian dan responden yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, terdapat kontak langsung antara peneliti dan responden pada lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Umar (2007 : 42) memaparkan bahwa, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk table – table, atau diagram – diagram. Sedangkan Sugiyono (2008 : 224) menyatakan bahwa, terkait dengan sumbernya, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Jadi yang dimaksudkan data data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang telah diolah pihak lain, sehingga sudah dapat langsung dimanfaatkan, seperti data struktur organisasi, uraian tugas, jabatan, statistic kepegawaian dan lain – lain.

4.4. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dan secara langsung ke lapangan dengan didukung dengan alat alat seperti: pedoman wawancara, perekam suara atau kamera foto.

4.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009 : 218) mengatakan dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan

memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi social yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa informan yaitu: Kepala SMP Negeri 3 Mengwi, Kepala Tata Usaha SMP Negeri 3 Mengwi, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Koordinator Guru SMP Negeri 3 Mengwi.

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dari jenis sumber data yang digunakan, maka teknik yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang proses implementasi peraturan Menteri pendidikan nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan di SMPN 3 Mengwi.

Adapun hal yang dicari atau pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di SMP Negeri 3 Mengwi?
2. Apa kendala atau factor – factor yang menghambat pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di SMP Negeri 3 Mengwi?

b. Dokumentasi

Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut disebut teknik documenter atau studi documenter.

c. Observasi

Yaitu penelitian dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang disesuaikan dengan objek yang diteliti. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis terjun langsung dan berinteraksi dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang seobjektif mungkin.

d. Online

Merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mendapatkan data dengan menggunakan fasilitas internet yang berkaitan dengan objek penelitian demi kesempurnaan dalam melakukan analisa. Bukti nyata yang digunakan adalah hasil penelitian – penelitian, produk dan lain –lan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan peraturan menteri pendidikan nomor 28 tahun 2016.

4.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian itu. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis ini mempunyai 3 komponen analisis yaitu :

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) Data Display

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan table atau gambar.

c) Conclusion Drawing/Verivication

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sepeerti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masi bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori.

4.8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* dalam Sugiyono (2007:270). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan pada penelitian ini adalah uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan, antara lain :

- a. Perpanjangan Pengamatan Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti

peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.
- c. Triangulasi Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).
 - 1) Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

- 2) Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).
 - 3) Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274).
- d. Analisis Kasus Negatif Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).
 - e. Menggunakan Bahan Referensi Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).
 - f. Mengadakan Membercheck Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

5. Pembahasan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 sudah diimplementasikan di SMP Negeri 3 Mengwi yang ditunjukkan dengan adanya suatu bukti yaitu rapor mutu pendidikan yang isinya capaian sekolah mengenai 8 standar mutu pendidikan. Dari 8 Standar Nasional Pendidikan hanya standar kompetensi lulusan yang sudah dikategorikan SNP, standar isi masih pada kategori menuju SNP 4, standar proses masih pada kategori menuju SNP 4, standar penilaian pendidikan masih pada kategori menuju SNP 4, standar pendidik dan tenaga kependidikan pada kategori menuju SNP 3, standar sarana dan prasarana masih pada kategori menuju SNP 3, standar pengelolaan pendidikan masih pada kategori menuju SNP 4, dan standar pembiayaan juga masih dikategorikan menuju SNP 4. Maka tentunya masih banyak yang bisa dikembangkan atau dicarikan solusi mengenai hambatan pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 tahun 2016 demi terwujudnya Standar Nasional Pendidikan.
2. Masih ada hambatan yang dihadapi SMP Negeri 3 Mengwi dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Hambatan – hambatan itu tidak hanya berasal dari dalam Sekolah tetapi juga berasal dari luar Sekolah yang menyebabkan pengimplementasian Permendikbud No. 28 tahun 2016 dalam peningkatan mutu pendidikan menjadi kurang optimal. Hambatan internal yang dimaksud adalah hambatan yang ada didalam lingkungan sekolah. Kualitas Guru sebagai pendidik masih perlu ditingkatkan, mengingat Sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 yang menuntut Guru lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar, masih ada Guru yang belum memenuhi standar pendidikan minimal juga mempengaruhi capaian sekolah pada rapor mutu pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada saat ini juga tidak sebanding dengan jumlah rombongan belajar. Saat ini jumlah siswa adalah 1101 yang terbagi menjadi 11 rombel kls 7, 11 rombel kls 8, dan 12 rombel kelas 9. Jadi rombel saat ini adalah 34, sedangkan kelas yang tersedia hanya 22 ruang kelas menyebabkan Sekolah

membagi proses pembelajaran, yaitu *shift* pagi dan *shift* sore. Selain itu, warga sekolah masih belum paham betul regulasi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016, menyebabkan warga sekolah menjadi kebingungan dalam pengimplementasian peraturan ini.

Kajian teoritis dari George C. Edward III yang menyebutkan ada hal yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi. Teori ini akan membandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti dibawah ini :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sejauh ini telah terjalin komunikasi antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan Sekolah, ini ditunjukkan dengan diadakannya pertemuan dengan Perwakilan Sekolah secara singkat pada rapat atau pelatihan. Disekolah sosialisasi peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan dalam setahun 2 kali, tetapi ini masi dirasa kurang karena belum sepenuhnya warga Sekolah memahami tentang Permendikbud ini.

2. Sumber Daya

Walau isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kurang sumber daya untuk menjalankan, implementasi tidak berjalan efektif. Dari rapor Pemetaan Mutu Pendidikan tahun 2018 yaitu hasil dari pengimplementasian Permendikbud nomor 28 tahun 2016, terlihat bahwa capaian SMP Negeri 3 Mengwi pada standar pendidikan dan tenaga kependidikan masih belum mencapai SNP. Hal ini dikarenakan karena masih ada Guru dan Pegawai yang berpendidikan belum memenuhi standar sesuai regulasi yang berlaku. Sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 3 Mengwi juga masih belum memenuhi standar karena perbandingan jumlah rombongan belajar dan jumlah kelas yang tersedia tidak sebanding yang menyebabkan implementasi menjadi kurang efektif.

3. Disposisi

Watak dan karakter yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap warga Sekolah saat ini sebagian besar sudah ikut andil dalam pengimplementasian Permendikbud ini, ini ditunjukkan dengan sudah dilaksanakannya tugas pokok dan fungsi dari masing masing pendidik dan tenaga kependidikan. Tetapi selama ini juga masih ada beberapa warga sekolah yang dinilai kurang disiplin didalam melaksanakan tugasnya yang menyebabkan implementasi Permendikbud No. 28 tahun 2016 kurang optimal.

4. Struktur Birokrasi

Yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Ada dukungan dari birokrasi dalam hal ini dari Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah dalam implementasi Permendikbud tersebut, walaupun masih terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Segala bantuan sudah diberikan untuk mengimplementasikan Permendikbud ini salah satunya dari Dinas Pendidikan Kabupaten yaitu setiap bulannya ada kunjungan ke Sekolah untuk memotivasi dan memonitoring Sekolah. Tetapi dukungan dari Komite Sekolah dirasa kurang, ini ditunjukkan dengan kunjungan Komite Sekolah sangat jarang. Sehingga apabila ada permasalahan yang dihadapi Sekolah, Komite kurang mengetahui permasalahan.

6. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang peneliti uraikan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. SMP Negeri 3 Mengwi sudah mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, tetapi didalam pelaksanaannya masih belum optimal.

2. Hambatan – hambatan dalam pengimplementasian Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 adalah hambatan – hambatan yang terjadi karena factor internal dan factor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah seperti masih ada regulasi dari Permendikbud yang belum sepenuhnya diketahui oleh warga Sekolah, Sumber daya yang dimiliki (sumber daya manusia dan sarana prasarana) masih perlu ditingkatkan. Faktor eksternal yang dimaksud adalah : hambatan yang tidak terduga dari luar lingkungan Sekolah misalnya suatu kegiatan tak terduga dari instansi diluar Sekolah yang harus diikuti, peran komite dalam membantu dan memotivasi Sekolah dalam mengimplementasikan Permendikbud No. 28 tahun 2016 kurang optimal.

Daftar Pustaka

- Abdilah, Junedi. 2015. *Manajemen Peningkatan Mutu Peserta Didik di SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan Kabupaten Brebes*. (Tesis). Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*., Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan*., Jakarta : Bumi Askara.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*., Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Anita. 2017. *Motivasi Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiah Negeri Kragean dan Madrasah Ibtidaiah Negeri Wirasada Purbalingga (Tesis)*. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*., Jakarta : Rineka Cipta.
- Atmaja, B. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : (Makalah) disampaikan Pada Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha Singaraja.
- Dunn N, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua., Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*,. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fadhli, Muhamad. 2017. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*.
- Fattah, Nanang. 2010. *System penjaminan mutu pendidikan*,. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hidayati. 2015. *Kepemimpinan dan Peningkatan Mutu Pendidikan*.
- Husaini Usman. 2006. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*,. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein, Umar. 2007, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kencana Syafiie, Inu. 2014. *Ilmu Administrasi*,. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Laksmi, Ni Nyoman Ayu, 2014. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SMP Negeri 1 Gianyar* (Tesis).Denpasar : Universitas Ngurah Rai Denpasar.
- Maswan, 2015. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Praja Tuala, Riyuzen. 2016. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/ Madrasah*
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, (2015), “*Sistem Informasi Akuntansi*”, Edisi 13, alih bahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari,. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2018. Perangkat Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Shobri, Muwafiqus. 2017. *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Hasan Jufri*.
- Subadiyah, Siti. 2015. *Pengaruh Budaya Sekolah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Mutu Pendidikan di SMKN 1 Pabelan*.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,. Bandung : ALFABETA

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kwantitatif dan R & D*,. Bandung : Alfabeta.

Syah Putra, Rahmad. 2017. *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SMA Negeri 3 Mulaboh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.